



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Perubahan Permendagri atau pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 ini.

Malili, April 2024
KEPALA DINAS,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan perubahan permendagri nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renja. Renja SKPD disusun dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategi sangat dinamis dengan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategi yang intinya mengacu pada Visi-Misi dan berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Perumusan rancangan Renja ini merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk merumuskan kebijakan dan program strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Renja sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi, visi dan misi organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penjelasan mengenai Program dan Kegiatan serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya



Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah serat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

Bab. V Penutup

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berpedoman pada Renstra SKPD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga mengacu pada Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

Secara umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang di perlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang di tetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2023 dapat dilihat melalui Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah



dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur.



Tabel. 1
Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	98,75	100	100	100,00%	95	98	97,92
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100,00	100	100	100,00%	100	100	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	10	5	2	2	100,00%	2	9	90,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	5	3	2	2	100,00%	2	7	140,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	5	2	0	0	0,00%		2	40,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	5	3	2	2	100,00%	2	7	140,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun tepat waktu	5	2	0	0	0,00%		2	40,00



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	10	4	0	0	0,00%		4	40,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	40	18	10	10	100,00%	10	38	95,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100,00%	100	60	60,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan	25	24	23	23	100,00%	25	14	57,60
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	95	38	19	19	100,00%	19	76	80,00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		95	100	100	100	100,00%	100	60	63,16
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	10	4	2	2	100,00%	2	8	80,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	5	1	0	0	0,00%		1	20,00



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	100,00%	100	60	60,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang diadakan	50	44	0	0	0,00%			
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	60	24	12	12	100,00%	12	48	80,00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45	17	12	12	100,00%	8	37	82,22
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95	100	100	100	100,00%	100	60	63,16
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	30	9	5	5	100,00%	5	19	63,33
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	75	26	15	15	100,00%	2	43	57,33
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan	35	14	7	7	100,00%	9	30	85,71
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360	144	72	72	100,00%	72	288	80,00



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	500	200	180	180	100,00%	130	510	102,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan	875	388	230	230	100,00%	210	828	94,63
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Persen)	95	100	100	100	100,00%	100	60	63,16
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan	25	7	43	43	100,00%	3	53	212,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan	40	15	16	16	100,00%	12	43	107,50
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4				0,00%	1	1	25,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	100	100	100	100,00%	100	60	63,16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	6500	2500	1250	1250	100,00%	1250	5000	76,92



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	180	72	36	36	100,00%	36	144	80,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan	20	7	4	4	100,00%	4	15	75,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	90	100	100	100,00%	100	58	61,05
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22	20	20	18	90,00%	20	12	52,73
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28	26	27	27	100,00%	27	16	57,14
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100,00%	1	1	60,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		76,55		75,60	88,74	117,38%	75,75	33	42,98
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		750	65	186	186	100,00%	146	397	52,93



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	300	90	60	60	100,00%	60	210	70,00
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	370	105	110	110	100,00%	70	285	77,03
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	80	16	16	16	100,00%	16	48	60,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (Persen)	43,98		22,47	29,01	129,11%	29,01	15,57	35,40
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	6600	2674	1500	1663	110,87%	1290	5627	85,26
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	1400	410	80	80	100,00%	80	570	40,71
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	400	80	40	40	100,00%	40	160	40,00
		Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	30	9	5	5	100,00%	5	19	63,33



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100	100	100	100	100,00%	100	60,00	60,00
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	100	96	116	116	100,00%	100	62	62,30
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100,00%	100	60,00	60,00
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	20	2	2	0	0,00%	4	6	30,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		13,5	30,06	22,82	20,00	87,64%	14,50	93,10	93,10
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100,00%	100	60	60,00
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	75	15	15	15	100,00%	15	45	60,00



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	225	90	45	45	100,00%	36	171	76,00
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100	100,0	100	100	100,00%	100	60	60,00
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	20	2	2	3	150,00%	4	9	45,00
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertama yang difasilitasi dan di Mediasi	150	71	30	30	100,00%	20	121	80,67



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina	192,00	64	32	32	100,00%	32	128	66,67
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	20	6	3	3	100,00%	3	12	60,00
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	6	2	1	1	100,00%	1	4	66,67
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	100	100	100	100,00%	100	60	60,00
	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		250	0	30	30	100,00%	60	90	36,00
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00
2	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	250	184	30	30	100,00%	60	274	109,60
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		660	414	30	30	100,00%	60	504	76,36



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		300	100	15	15	100,00%	30	145	48,33
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	18	15	4	4	100,00%	3	22	122,22
2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Calon Transmigrasi yang diseleksi	125	92	15	15	100,00%	30	137	109,60
3	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi pembangunannya	480	230	150	150	100,00%	150	530	110,42
4	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	450	82				38	120	26,67
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	100	100	100	100,00%	100	60	60,00
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		1	1	1	1	100,00%	1	1	60,00
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonomi-nya (Orang)	250	50	50	50	100,00%	92	192	76,80



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (realisasi kinerja 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=5+7+9	11=10/4
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah DED Gambar yang dibuat (Dok)	19	3	4	4	100,00%	5	12	63,16

Sasaran 1. Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigrasi

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya meningkatnya pengembangan dan kemandirian warga transmigran dengan indicator persentase warga transmigran mandiri. Kriteria dari warga transmigran mandiri yaitu pendapatannya meningkat serta kondisi tempat tinggal bertambah baik, sehingga dapat hidup mandiri setelah penempatan. %. Formulasi indicator Persentase warga transmigran mandiri yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkat Taraf hidupnya}}{\text{Jumlah transmigran yang telah ditempatkan}} \times 100 \%$$

❖ Capaian Kinerja Sasaran Strategis:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	Persen	62,31	99,17 %	62,77	61,68	98,26 %	65,52
								94,13 %

Capaian persentase warga transmigran mandiri Tahun 2023 yaitu 61,68 % dari target 62,77 % atau dengan tingkat capaian 98,26 %. Dari 1370 KK warga transmigran yang telah ditempatkan pada wilayah Mahalona Raya, sebanyak 845 KK yang telah meningkat taraf hidupnya dan hidup mandiri.

No	Lokasi	Jumlah Warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah Warga Transmigran Mandiri (KK)	
			2022	2023
1	UPT Mahalona SP 1 Desa Libukan Mandiri	330	152	154
2	UPT Mahalona SP 2 Desa Kalosi	300	144	144
4	UPT Mahalona SP 3 Desa Buangin	360	246	247
5	UPT Mahalona SP 4 Desa Mahalona	200	165	167
6	UPT SKPC 1 Koromalai Desa Mahalona	180	133	133
	Jumlah	1370	840	845

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penetapan kawasan transmigrasi, target 100 % dengan realisasi 100%. Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan untuk menjadi lokasi Pembangunan dan Penempatan warga transmigrasi yaitu SKPC 1 Koromalai di Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

Terdapat 1 kegiatan pada program ini:

1) Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan dengan realisasi 30 Ha dari target 30 Ha (100%). Ada 2 (dua)

Sub kegiatan pada Kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Ouput kegiatan ini yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi Realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan (100%). Kawasan yang telah diidentifikasi untuk Pembangunan dan Penempatan transmigrasi yaitu SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti

b) Sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Output dari sub kegiatan ini yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi 30 Ha dari target 30 Ha (100%). Sebanyak 30 Ha Lahan yang disiapkan dan disediakan untuk pembangunan dan penempatan warga transmigran.

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigran

Indikator dari program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun, Realisasi sebanyak 30 Ha dari target 30 Ha atau dengan capaian kinerja 100%. Wilayah transmigran yang dibangun tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dibangun tersebut diperuntukan untuk penempatan warga transmigran baik itu transmigran daerah asal maupun transmigran lokal.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang capaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan dengan realisasi 15 KK dari target 15 KK (100%). Penempatan warga transmigran terdiri dari 8 KK dari Daerah Asal dan 7 KK transmigran lokal.

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini Jumlah MoU yang direalisasikan, realisasi 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%). MoU tersebut berupa MoU terkait penempatan warga transmigran dari Daerah Asal. MoU yang dibuat antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, MoU antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, MoU



Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Mesuji Prov. Lampung dan MoU antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Pemerintah Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

- b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi, realisasi 150 KK dari target 150 KK yang telah diseleksi (100%). Calon Transmigran yang diseleksi berasal dari calon transmigran Lokal atau setempat

- c) Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi, ada 15 unit RTJK yang difasilitasi dari target 15 unit (100%). Pembangunan RTJK bersumber dari anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring terhadap Pembangunan RTJK tersebut.

3. Program Pengembangan Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah warga transmigran yang masih dalam masa binaan sebanyak 195 KK yang berada pada SKPC Koromalai Desa Mahalona Kec. Towuti



Ada 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

- 1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
Indicator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.
 - a) Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
output dari sub kegiatan ini. yaitu Jumlah Dokumen DED yang dibuat, realisasi 4 Dokumen dari target 4 Dokumen (100%). DED yang dibuat merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran untuk Pembangunan Kawasan transmigrasi yang bersumber dari Dana APBN
 - b) Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya, 50 orang warga transmigran yang dibina usaha ekonominya dari target 50 orang (100%)

Sasaran 2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Formulasi perhitungan indikator penyerapan tenaga kerja baru, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Penganggur pada Tahun n-1}} \times 100 \%$$



❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Target Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru tahun 2023 yaitu 19,67%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	18,31	94,51 %	19,67	23,00	116,9 %	100.61 %

Capaian Kinerja pada Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada Tahun 2023 sebesar 23,00% dari target 19,67% atau dengan capaian kinerja sebesar 116,92 %. Data Penganggur yang terserap dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sesuai data yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebanyak 1663 orang. Sementara Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data rilis BPS per Agustus 2022 sebanyak 7.230 Orang.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Luwu Timur, Agustus 2021 - Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan (2021-2022)	Perubahan (2022-2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	221.749	225.805	227.135	4.056	1.33
Angkatan Kerja	162.182	161.470	157.300	-712	-4.17
■ Bekerja	154.130	154.240	148.779	110	-5.461
■ Pengangguran	8.052	7.23	8.521	-822	1.291
Bukan Angkatan Kerja	59.567	64.335	69.835	4.768	5.5
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	4,48	5,42	-0,48	0,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14	71,51	69,25	-1,63	-2,25

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-Agustus 2023

Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	TAHUN	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)
1	2019	1.876
2	2020	1.299
3	2021	3.225
4	2022	1474
5	2023	1663

Program dan kegiatan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator dari Program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan formulasi Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi di bagi jumlah Pendaftar peserta pelatihan kompetensi x 100%. Realisasi

87,74% dari target 75,60 %. Pada tahun 2023 sebanyak 186 orang peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi dari 212 pendaftar peserta pelatihan yang diikuti dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Para peserta yang lulus untuk mengikuti Pelatihan akan mendapatkan keahlian serta keterampilan sehingga nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar kerja.

Ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 SubKegiatan yang menunjang program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut yaitu

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi 186 orang dari target 186 orang dengan tingkat capaian 100%.

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dari target 60 orang (100%), Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 110 orang (SIO alat berat dan dump truck), dari target 110 orang (100%), dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang (surveyor) dari target 16 orang

Kegiatan ini juga merupakan Program Kegiatan Prioritas (KP 1) Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program yaitu Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan. Realisasi 29,01% dari target 22,47% atau dengan tingkat capaian 129,10%. Tahun 2023 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan sebanyak 1.663 orang sedangkan Jumlah Pencari kerja sebanyak 5.732 orang. Pencari Kerja Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yakni 9.469 orang sedangkan Jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 yakni 1.474 orang.

Ada 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang menunjang Program ini yakni:

- 1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator dari Kegiatan ini yaitu Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja. Realisasi sebanyak 1663 orang dari target 1500 penempatan tenaga kerja dengan tingkat capaian 110,86%
 - a) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target kegiatan 80 orang dengan realisasi 80 orang atau dengan tingkat capaian 100%.
 - b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang (100%)
Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indikator kedua yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan realisasi 4 kelompok dari target 4 Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja
- 2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang melaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online serta Sosial Media.

- a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 116 Info Loker dari target 116 info loker (100%).
- 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan pada Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

Ada 1 sub kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi. Selama tahun 2023 tidak ada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Namun demikian, tetap dilakukan Koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
3. Program Hubungan Industrial
Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 22,82% dan sedangkan realisasi sebesar 20,00%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.
Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada tahun 2023 berjumlah 30 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang berjumlah 46 kasus. Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 150 Perusahaan.

Tabel 3.87
Angka Sengketa Pekerja tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2022
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	14	34	25	46	30
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	123	151	147	153	150
3	Angka tenaga sengketa pekerja pertahun	%	11,38	22,82	17,01	30,06	20,00

Hubungan Industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah. Hubungan tersebut dilaksanakan melalui sarana Hubungan Industrial yang meliputi: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Bipartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk menjembatani agar hubungan industrial dapat berjalan dengan harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Khususnya Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya kepada pengusaha dan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Seluruh kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi dan dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur. Fasilitasi dilakukan dengan pendekatan musyawarah/mufakat atau bipartit para pihak yang berselisih dengan bimbingan Dinas Transnaker Kab.Luwu Timur. Sedangkan, bila terjadi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara bipartite, maka ditempuh jalur mediasi formal oleh mediator atau pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan sering terjadi perselisihan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja. Perselisihan tersebut diklarifikasikan menjadi perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.

Perselisihan merupakan dinamika hubungan Industrial yang tidak bisa dihindari antara pengusaha, pekerja /buruh dan serikat pekerja/buruh. Untuk itu, Dinas Transnaker melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.88
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NO	Uraian	Tahun				
		2019 (kasus)	2020 (kasus)	2021 (kasus)	2022 (kasus)	2023 (kasus)
1	PHK	0	1	7	14	10
2	SP/SB	0	1	0	0	0
3	KEPENTINGAN	2	2	1	4	3
4	HAK	12	30	17	18	17
	Jumlah	14	34	25	46	30

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .
Output kegiatan yaitu Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga dan Kerja Tahun 2023 sebanyak 13.339 orang dan telah terdaftar seluruhnya pada program Jamsostek
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%) serta

- b) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Ouput dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB, realisasi 15 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (100%)

- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi.

- a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi, realisasi 3 kasus dari target 3 kasus (100%)

- b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 30 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 30 kasus atau dengan tingkat capaian 100%

- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Ouput dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%)

- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, realisasi 3 rekomendasi dari target 3 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Lembaga Tripartit

- e) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2024 dengan besaran Rp. 3.531.561,-

Tabel 3.89

Data Serikat Pekerha/Serikat Buruh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2022

NO	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh	31	32	41	38	34

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

Target Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah yaitu 95%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	%	96,45 %	101,52 %	95 %	98,15%	103,31 %	98,15%

Indikator dari Sasaran 3 adalah Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2023 Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yaitu 98,15% dari target 95 % atau dengan Tingkat capaian 103,31%

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan nilai indicator dari 96,45% tahun 2022 menjadi 98,15% pada tahun 2023. Sehingga ada peningkatan 1,7%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 95%. Realisasi sebesar 98,15% atau dengan Tingkat capaian 103,31%

Ada 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan yang menunjang Program ini yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi 100% dari target 100% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 2 Dokumen, realiasi 2 Dokumen (100%) dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu. Dokumen yang Perencanaa yang disusun yaitu Dokumen Renja Pokok 2023 dan Renja Perubahan 2023
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen, realisasi 2 dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 2 dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi 10 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi sebanyak 23 Orang dari target 23 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (100%),
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Realisasi 19 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Barang perangkat daerah, realisasi 100% dari target 100%

- a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Realisasi 2 Dokumen dari target 2 Dokumen Laporan penatausahaan
Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (100%)
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi
kepegawaian perangkat daerah, realisasi 100 % dari target 100%.
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen Jumlah Laporan Data
Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (100%)
 - b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Realisasi 12 Orang dari target 12 Orang aparatur yang mengikuti bimtek,
diklat, workshop, seminar perundang-undangan (100%)
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah
yang terpenuhi, realisasi 100% dari target 100%.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang
tersedia, Realisasi 5 jenis dari target 5 jenis (100%)
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan, realisasi 15 jenis dari
target 15 jenis (100%)
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia, realisasi 7 jenis dari
target 7 jenis (100%)

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan, realisasi 72 eksemplar dari target 72 eksemplar (100%)
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya, realisasi 180 orang dari target 180 orang (100%)
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan realisasi 230 kali dari target 230 kali (100%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Jumlah Mebel Yang di Adakan, realisasi 43 unit dari target 43 unit (100%), pengadaan meuble berupa 1 unit lemari arsip dan 42 Unit Kursi Rapat.
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan, realisasi 16 unit dari target 16 unit (100%). Pengadaan Peralatan dan mesin berupa 1 paket Mic Rapat, 2 Unit LCD Proyektor, 2 unit Komputer (PC), 4 unit Printer, 5 Unit Laptop, 1 Unit Tablet dan 1 Unit Mesin babat
- 7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi, realisasi 100 % dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan, realisasi 1250 dari target 1250 surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (100%)

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan, realisasi 36 Rekening dari target 36 rekening (100%)
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan, realisasi 4 orang dari target 4 orang (100%). 2 orang tenaga Kebersihan (Cleaning Service) dan 2 orang Tenaga keamanan (Security).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai IKK yang telah ditetapkan berdasarkan Urusan:



Tabel 4
Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi	Cat.
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Indikator Kinerja Impact													
	Tingkat partisipasi angkatan kerja				70,48	70,98	71,10	67,50	72,38	73,14	71,51	69,25	69,50	
	Tingkat pengangguran terbuka (persen)				4,39	4,28	4,17	3,92	3,92	4,96	4,48	5,42	4,92	
	Rasio penduduk yang bekerja				95,61	95,72	95,83	98,08	96,95	95,04	95,52	94,58	94,08	
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas				0,60	0,65	0,69	0,72	0,89	1,45	0,65	0,73	0,73	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi	Cat.
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	transmigrasi swakarsa				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Indikator Kinerja (Outcome)													
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun (sengketa)				9,93	9,93	9,27	9,27	9,27	17,01	30,07	20,00	9,27	
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Persen)				13,33	13,33	14,29	14,29	15,38	12,80	80,18	36,67	44,29	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi	Cat.
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Persen)				41,87	41,98	42,57	43,07	43,98	39,26	15,57	29,01	30,57	
	Keselamatan dan Perlindungan				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah (Persen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (Persen)				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan				Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan				75,75	75,60	75,70	75,75	76,55	72,22	85,38	81,94	85,70	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi	Cat.
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
	berbasis Kompetensi (Persen)													
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Orang)				488,81	498,76	500,23	510,23	510,23		498,76	498,76	500,23	

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

2.2.1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industri pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan kontraktor adalah pilihan utama yang paling diminati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengangguran antara lain karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, juga disebabkan karena perubahan struktur perekonomian, perubahan teknologi, serta keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka perlu meningkatkan SDM melalui informasi kerja, pendidikan, keterampilan dan keahlian/Kompetensi bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.2.2 Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktifitas. Dalam hubungan industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak sesuai, sehingga di perlukan

keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi.

Di dalam ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari 4 jenis perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

Terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan dinamika yang sering terjadi di perusahaan. Timbulnya perselisihan hubungan industrial dapat disebabkan karena: 1) adanya perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 2) pelanggaran terhadap kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 3) adanya tuntutan kepentingan diluar kontrak kerja yang disepakati khususnya terkait dengan kesejahteraan pekerja/buruh.

2.2.3 Bidang Ketransmigrasian

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energy alternative serta mendukung pemerataan investasi. Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan

kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT), maka perlu :

- ❖ Meningkatnya program pengembangan wilayah tranmsigrasi
- ❖ Meningkatnya program transmigrasi lokal

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan public (*public service*) dan tanggung jawab (*akuntabilitas*) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang di rencanakan.

Berbagai faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerjadi Kabupaten Luwu Timur.

Bedasarkan hasil idenfikasi permasalahannya kaitannya dengan rencana pembangunan Nasional (Renstra K/L) dan Provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan

lingkungan serta pelaksanaan MDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industry pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan kontraktornya adalah pilihan utama yang paling di minati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 yaitu 5,42% mengalami peningkatan 0,94% dari tahun 2022. TPT tahun 2023 mengalami peningkatan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga - lembaga pendidikan formal. Sementara Pertumbuhan lapangan kerja baru yang masih belum memadai sehingga dengan Kondisi tersebut memberikan imbas bagi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktifitas. Dalam hubungan

industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang tidak sesuai, sehingga di perlukan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi. Hal tersebut diakibatkan Kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang Norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha

Terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan dinamika yang sering terjadi di perusahaan. Timbulnya perselisihan hubungan industrial dapat disebabkan karena: 1) adanya perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 2) pelanggaran terhadap kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 3) adanya tuntutan kepentingan diluar kontrak kerja yang disepakati khususnya terkait dengan kesejahteraan pekerja/buruh.

Untuk penanganan perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Didalam ketentuan tersebut penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditangani oleh Konsiliator, Arbiter atau Mediator. Cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang familiar dan sering dilaksanakan adalah penanganan kasus perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial. Namun demikian sebelum penanganan oleh Mediator maka para pihak yang berselisih wajib melakukan bipartit dimana dengan pertemuan bipartit tersebut diharapkan dapat tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Bila proses bipartit tersebut mengalami kebuntuan atau kegagalan

barulah diupayakan untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kepada Mediator Hubungan Industrial.

Pada faktanya yang sering terjadi adalah pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh lebih suka menyampaikan langsung gugatan kepada pemerintah melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan daripada melalui proses bipartit, sehingga untuk penyelesaian seperti ini dilakukan melalui fasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini meskipun dibantu oleh Distransnaker namun masih dianggap sebagai penyelesaian perselisihan diluar ketentuan undang-undang atau non lititgasi. Pada prinsipnya baik bipartit maupun fasilitasi semuanya adalah upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Demikian pula bila proses fasilitasi gagal maka para pihak tetap diarahkan untuk melakukan bipartit yang menjadi syarat untuk dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial.

Dari beberapa pengalaman melakukan fasilitasi maupun mediasi maka ada kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat tercapai Perjanjian Bersama namun ada pula yang tidak dapat tercapai kesepakatan. Untuk kasus perselisihan yang tidak bisa mencapai kesepakatan maka Mediator Hubungan Industrial akan mengeluarkan anjuran yang selanjutnya akan ditanggapi para pihak yang berselisih. Bila pihak pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menerima isi anjuran maka para pihak dapat melaksanakan isi anjuran sehingga bisa dinilai bahwa kasus perselisihan telah selesai. Namun bila salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan pencatatan untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perselisihan hubungan industrial maka ada beberapa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh perusahaan untuk memantau adanya potensi perselisihan hubungan industrial;
- 2) Mendorong agar perusahaan memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- 3) Mendorong terbentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan seperti LKS Bipartit;
- 4) Mewajibkan penerapan Upah Minimum Kabupaten;
- 5) Mendorong penerapan struktur skala upah;
- 6) Mewajibkan adanya perlindungan jaminan sosial baik JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan.

2. Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energy alternative serta mendukung pemerataan investasi.

Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur. Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang

harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Beberapa hambatan dan masalah yang dihadapi dalam program transmigrasi diantaranya yaitu Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Tansmigrasi, Infrastruktur yang masih kurang memadai, dan Sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua yang merupakan hak milik warga Transmigrasi belum terbit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen RPJP, RPJMD, dan Renstra SKPD. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan), RPJMN dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas dan konsistensi. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya.

Dalam Visi Misi Bupati Terpilih periode 2021-2026, Urusan Tenaga Kerja mempunyai program prioritas seperti yang tertuang dalam Misi 2 yaitu Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. Dalam hal ini, Program Prioritas Tenaga Kerja yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Calon Tenaga Kerja sehingga memerlukan target serta anggaran yang lebih dari rancangan awal Renja 2025 seperti yang terlihat pada Tabel TC-31

Berikut kami sajikan review rancangan awal RKPD Kab. Luwu Timur dan analisa kebutuhan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dalam tabel berikut:



Tabel 5
Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	4.818.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	4.966.917.349	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100,00	83.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100,00	126.431.500	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32.400.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.746.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	84.285.500	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	3.769.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	3.890.731.749	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang	3.720.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang	3.821.830.749	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triulanan/semesteran	19 Dokumen	49.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triulanan/semesteran	19 Dokumen	68.901.000	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)	95,00	16.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)	95,00	15.350.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	16.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	15.350.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu (%)	100,00	102.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu (%)	100,00	131.121.500	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	49 paket	40.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	49 paket	36.100.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	32.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	33.923.500	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 orang	30.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	61.098.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	95,00	398.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	95,00	397.836.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	2.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 paket	4.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	6.373.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 paket	8.117.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 dokumen	7.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100 Orang	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	15.125.000	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	50 Orang	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	358.220.600	
		Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	100 Orang						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)	95,00	190.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)	95,00	137.700.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	5 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	27 unit	51.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	7 unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	86.700.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95,00	140.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95,00	162.416.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1500 surat	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menysurat	4 Laporan	19.916.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36 Rekening	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	63.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	4 Orang	65.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	78.900.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95,00	120.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95,00	105.330.000	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	22 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	64.460.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	28 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	23.610.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	17.260.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,38	850.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,5%	41.207.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun (dokumen)	1,00	850.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	41.207.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang tersusun (dokumen)	1,00	850.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang tersusun (dokumen)	1 Dokumen	41.207.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	76,55	1.292.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75,75	1.182.222.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang responsif gender (%)	160 orang	1.292.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang responsif gender (%)	146 orang	1.182.222.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (Kerjasama ATS) (Orang)	30 Orang	1.292.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun-n	146 orang	1.182.222.000	
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3 (Orang)	100 Orang						
		Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan	30 Orang						



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
		Pelatihan kerjasama BLK (Orang)							
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	43,98	436.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	43,07%	363.027.500	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	1300 orang	355.000.000	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	1290 orang	247.004.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	330 orang	70.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	80 orang	61.275.500	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan (Orang)	100 orang	285.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	60 orang	185.728.500	
		Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi (Kelompok)	5 Kelompok						
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan (%)	100,00	31.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan (%)	100,00	47.974.500	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan (Loker)	100 loker	31.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)	950 orang	47.974.500	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja indonesia asal kabupaten luwu timur yang bermasalah yang difasilitasi (%)	100,00	50.000.000	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja indonesia asal kabupaten luwu timur yang bermasalah yang difasilitasi (%)	100,00	68.049.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi (Orang)	4 Orang	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	4 Orang	68.049.000	
		Jumlah tenaga kerja asing yang diawasi (Orang)	30 Orang						
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun (%)	14,20	807.229.750	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun (%)	14,50	533.247.000	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100,00	199.000.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100,00	133.998.500	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina (Perusahaan)	45 Perusahaan	129.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	45 laporan	98.276.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	15 Perusahaan	70.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online.	15 Perusahaan	35.722.500	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi (%)	100,00	608.229.750	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi (%)	100,00	399.248.500	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi (Kasus)	4 Kasus	110.365.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah perselisihan yang dicegah	4 Perkara	59.894.500	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Tahunan yang di fasilitasi dan dimediasi (Kasus)	15 Kasus	146.455.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	129.260.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina (OPP)	32 OPP	72.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	32 asosiasi dan serikat pekerja	49.258.500	



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	150.345.250	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	85.668.500	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan (Dokumen)	1 Dokumen	129.064.500	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	14000 Orang	75.167.000	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penetapan kawasan transmigran (%)	100,00	65.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penetapan kawasan transmigran (%)	100,00	82.495.000	
	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan	50 Ha	65.000.000	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan	50 Ha	82.495.000	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi (Kawasan)	1 Dokumen	30.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	1 Dokumen	28.344.000	
	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ha)	50 Hektar	35.000.000	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	90 Hektar	54.151.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun	50 Ha	285.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun	50 Ha	332.678.000	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan	50 KK	285.000.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan	50 KK	332.678.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan (Dokumen)	3 Dokumen	160.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	4 Laporan	218.709.500	
		Jumlah Laporan Dana Dekon / Dana TP yang disusun (Dokumen)	2,00				1 Dokumen	46.390.500	



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5,00	6	7	9	10	11	12
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi (Unit)	22 unit	30.000.000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	15 KK	36.998.000	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Warga Transmigran yang diseleksi (KK)	80 KK	35.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	15 KK	30.580.000	
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	80 KK	35.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan			
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)	50 KK	25.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat transmigran yang dibina (%)	100,00	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat transmigran yang dibina (%)	100,00	395.633.500	
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	1 Kawasan	350.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	1 Kawasan	395.633.500	
	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya (Orang)	50 KK	50.000.000	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina	180 KK	139.364.500	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah DED/Gambar yang dibuat (Dokumen)	4 Dokumen	300.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan.	1 Satuan permukiman	256.269.000	
		Jumlah batas lahan transmigran yang dibangun (Paket)	1 Paket						
	TOTAL PAGU			8.903.729.750				7.897.427.349	

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD tahun 2025, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan berdasarkan target program dan kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan melalui RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- ✓ Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim perancangan daerah (BAPPELITBANGDA) yang kemudian oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di perjelas dalam bentuk Program Prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas.
- ✓ Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing bidang di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan menjadi bahan diskusi dalam Musrembang Kecamatan Untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan di bahas dalam Musrembang Kabupaten.
- ✓ Hasil Musrembang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun tersebut.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Dalam perkembangannya pada satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain yang berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung. Secara umum, keterkaitan dengan adanya RENJA Tahun 2025 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah untuk mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Di dalam bab ini dipaparkan secara umum tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan terkait dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh pemerintah bahwa perlunya dilakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik pada pengenaan berupa program dan kegiatan yang dilakukan sampai kepada tingkat SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan untuk jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran;
- ✓ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja;
- ✓ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigrasi;
- ✓ Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru;
- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan/sistematikanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat pada Tabel TC 33.



Tabel 6
Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Penunjang								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		100,00	4.966.917.349			100,00	5.375.398.372
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100,00	126.431.500			100,00	142.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	32.400.000	APBD		2 Dokumen	35.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	5.746.000	APBD		1 Dokumen	7.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	4.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	84.285.500	APBD		8,00	95.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100,00	3.890.731.749			100,00	3.996.398.372
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		26 Orang	3.821.830.749	APBD		35 Orang	3.921.398.372
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		19 Dokumen	68.901.000	APBD		19 Dokumen	75.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)		95,00	15.350.000			95,00	20.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		2 Laporan	15.350.000	APBD		2 Laporan	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu (%)		100,00	131.121.500			100,00	150.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		49 paket	36.100.000	APBD		50 paket	45.000.000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		12 dokumen	33.923.500	APBD		12 dokumen	45.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		10 orang	61.098.000	APBD		7 orang	60.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)		95,00	397.836.100			95,00	407.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		5 paket	2.500.000	APBD		5 paket	3.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		2 paket	6.373.000	APBD		15 paket	7.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		7 paket	8.117.500	APBD		7 paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		72 dokumen	7.500.000	APBD		72 dokumen	9.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan	15.125.000	APBD		12 Laporan	17.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	358.220.600	APBD		12 laporan	360.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi (%)		95,00	137.700.000			95,00	385.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		27 unit	51.000.000	APBD		5 unit	45.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		12 unit	86.700.000	APBD		7 unit	90.000.000



Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				APBD		1,00	150.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				APBD		1 Unit	100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		95,00	162.416.500			95,00	165.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat		4 Laporan	19.916.500	APBD		4 Laporan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		4 Laporan	63.600.000	APBD		4 Laporan	65.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		4 Laporan	78.900.000	APBD		4 Laporan	80.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		95,00	105.330.000			95,00	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		18 Unit	64.460.000	APBD		22 Unit	65.000.000



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40 unit	23.610.000	APBD		28 unit	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	17.260.000	APBD		1 Unit	20.000.000
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja								
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		71,5%	41.207.000			71,5	20.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun		1 Dokumen	41.207.000				20.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	41.207.000	APBD			20.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)		75,75	1.182.222.000			75,75	1.285.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang responsif gender (%)		146 orang	1.182.222.000			160 orang	1.260.000.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun-n		146 orang	1.182.222.000	APBD		160 orang	1.260.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						100,00	25.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina						3,00	25.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)		43,07%	363.027.500			43,07	380.000.000
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja		1290 orang	247.004.000			1320 orang	255.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan		80 orang	61.275.500	APBD		330 orang	65.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		60 orang	185.728.500	APBD		100 orang	190.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan (%)		100,00	47.974.500			100,00	50.000.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karirhub)		950 orang	47.974.500	APBD		100 orang	50.000.000
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja indonesia asal kabupaten luwu timur yang bermasalah yang difasilitasi (%)		100,00	68.049.000			100,00	75.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		4 Orang	68.049.000	APBD		4 Orang	75.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun (%)		14,50	533.247.000			14,50	565.000.000
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek (%)		100,00	133.998.500			100,00	140.000.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan		45 laporan	98.276.000	APBD		45 laporan	100.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online.		15 Perusahaan	35.722.500	APBD		15 Perusahaan	40.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi (%)		100,00	399.248.500			100,00	425.000.000



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah perselisihan yang dicegah		4 Perkara	59.894.500	APBD		4 Perkara	60.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		20 Perkara	129.260.000	APBD		15 Perkara	135.000.000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi		32 asosiasi dan serikat pekerja	49.258.500	APBD		32 asosiasi dan serikat pekerja	60.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	85.668.500	APBD		1 Lembaga	90.000.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		14000 Orang	75.167.000	APBD		14000 Orang	80.000.000
	Urusan Pilihan								
	Transmigrasi								
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penetapan kawasan transmigran (%)		100,00	82.495.000			100,00	85.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan		50 Ha	82.495.000			50 Ha	85.000.000
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain		1 Dokumen	28.344.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi		90 Hektar	54.151.000	APBD		50 Hektar	55.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun		50 Ha	332.678.000			50 Ha	366.000.000
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan		50 KK	332.678.000			50 KK	366.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) daerah kabupaten/kota		4 Laporan	218.709.500	APBD		3 Laporan	245.000.000
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)		1 Dokumen	46.390.500	APBD		1 Dokumen	50.000.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan		15 KK	36.998.000	APBD		80 KK	40.000.000



**Rencana Kerja
Distransnaker Kab. Luwu Timur
Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan		15 KK	30.580.000	APBD		80 KK	31.000.000
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Pelatihan (Orang)							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat transmigran yang dibina (%)		100,00	395.633.500			100,00	440.000.000
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan		1 Kawasan	395.633.500			1 Kawasan	440.000.000
	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina		180 KK	139.364.500	APBD		50 KK	140.000.000
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan.		1 Satuan permukiman	256.269.000	APBD		1 Satuan permukiman	300.000.000
					7.897.427.349				8.516.398.372





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur direncanakan melaksanakan 7 program dan 17 kegiatan serta 43 Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, di antaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan Antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Program Hubungan Industrial
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial

- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan Transmigrasi
5. Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman



BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana kerja (Renja) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja ini memiliki fungsi sebagai instrument pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini diharapkan dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini yang juga merupakan tahun ketiga Renstra periode 2021-2026, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025 diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama dan tercapainya target dan sasaran dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021-2026

Dalam Mendukung Pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021-2026, perlu dukungan dari aspek anggaran khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi calon tenaga kerja agar dapat berdaya saing.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Malili, April 2024

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001